

FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN PROGRAM DANA DESA: TINJAUAN PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

SHABRINA AGUSTIN GHASSANI



**ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Faktor Penghambat Pengelolaan Program Dana Desa: Tinjauan Perspektif Kelembagaan” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Desember 2022

Shabrina Agustin Ghassani
NIM H051190031

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

RINGKASAN

SHABRINA AGUSTIN GHASSANI. Faktor Penghambat Pengelolaan Program Dana Desa: Tinjauan Perspektif Kelembagaan. Dibimbing oleh DOMINICUS SAVIO PRIYARSONO, WIWIEK RINDAYATI dan ANNISA UTAMI SEMINAR

Sejak hadirnya Nawacita poin ketiga, pembangunan di Indonesia mulai memberikan fokus pada pembangunan wilayah pedesaan. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hadirnya UU No.6/2014 menegaskan pengakuan status dan kepastian hukum akan desa dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia. Melalui UU No.6/2014, desa sebagai lokus pemerintahan terkecil di Indonesia juga diberikan tambahan pendapatan berupa Dana Desa yang dianggarkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hadirnya Dana Desa bertujuan untuk (1) Meningkatkan pelayanan publik di Desa; (2) Mengentaskan kemiskinan; (3) Memajukan perekonomian Desa; (4) Mengatasi kesenjangan antar desa; dan (5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kabupaten Bogor merupakan kabupaten penerima Dana Desa terbesar di Jawa Barat. Dalam hal ini, pengelolaan Dana Desa yang tepat diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan pedesaan di Kabupaten Bogor. Namun, hingga saat masih ditemukan pelanggaran pengelolaan Dana Desa seperti pembuatan laporan fiktif, keterlambatan pelaporan, hingga penggunaan yang di luar bidang prioritasnya. Hal ini dikarenakan lemahnya kapasitas kelembagaan desa yang berdampak pada buruknya pengelolaan program Dana Desa sehingga mengakibatkan pembangunan desa yang tidak optimal. Di sisi lain, kelembagaan merupakan dimensi yang memiliki peran penting dalam pembangunan karena berperan untuk mengatur pengelolaan, efisiensi, dan keberlanjutan sumber daya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi peran kelembagaan desa dalam pengelolaan program Dana Desa; (2) Menganalisis elemen kelembagaan yang menjadi faktor penghambat dalam program Dana Desa; dan (3) Merumuskan strategi untuk menguatkan kelembagaan desa dalam menjalankan program Dana Desa.

Penelitian ini dilakukan pada studi kasus tiga desa yang berada di Kabupaten Bogor. Komposisi tiga desa studi kasus terdiri dari satu desa maju, satu desa berkembang, dan satu desa tertinggal. Nama desa disamarkan menjadi Desa X, Desa Y, dan Desa Z atas permintaan dan kesepakatan bersama informan. Pendekatan campuran (*mix method*) menggunakan strategi metode campuran bertahap atau *sequential mixed method* diterapkan dengan prosedur bertahap yang dimulai dari pengumpulan data dan analisis data secara kualitatif dan dilanjutkan dengan pengumpulan data dan analisis data secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi peran kelembagaan dan menganalisis faktor penghambat program Dana Desa berdasarkan perspektif kelembagaan. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan desa dalam menjalankan program Dana Desa.

Pada pendekatan kualitatif, analisis isi dan analisis tematik digunakan sebagai metode untuk menjawab tujuan satu dan dua penelitian. Hasil analisis menunjukkan peran kelembagaan desa dalam pengelolaan program Dana Desa berdasarkan



elemen kelembagaan kultural-kognitif, normatif, dan regulatif di Desa X sebagai desa dengan tipologi desa berkembang tergolong lebih baik dibandingkan Desa Y dengan tipologi desa maju dan Desa Z dengan tipologi desa tertinggal. Hal ini dikarenakan partisipasi dan kohesi sosial masyarakat Desa X didasari atas kesadaran akan hak untuk pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan bersama. Selain itu, Kepala Desa X dinilai lebih transparan, inovatif, dan responsif dalam menjalankan program Dana Desa sehingga mampu menjalin sinergitas dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa ditemukannya faktor penghambat program Dana Desa dalam setiap elemen kelembagaan. Pada elemen kultural-kognitif dan normatif, rendahnya pengetahuan masyarakat di ketiga desa menghasilkan alokasi pemanfaatan Dana Desa yang tidak berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, pada Desa Y dan Desa Z, rendahnya pengetahuan masyarakat yang didukung oleh lemahnya transparansi dan inovasi kepala desa berakibat pada terhambatnya pengelolaan BUMDes yang optimal. Tidak hanya itu, lemahnya partisipasi dan kohesi sosial masyarakat Desa Y dan Desa Z menyebabkan masyarakat hanya berperan sebagai objek pembangunan semata. Pada elemen regulatif, lemahnya regulasi pengawasan dan evaluasi program Dana Desa di Desa Y dan Desa Z menghantarkan pada rendahnya komitmen pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa secara tepat.

Pada pendekatan kuantitatif, metode *Analytical Hierarchy Process* atau AHP digunakan untuk menyajikan prioritas strategi penguatan kelembagaan desa yang paling tepat berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan. Dari lima alternatif strategi yang dihasilkan, analisis AHP menunjukkan bahwa strategi yang memiliki bobot prioritas paling besar untuk menguatkan kelembagaan desa adalah membangun regulasi yang menghadirkan skema *social control* untuk kegiatan evaluasi dan monitoring Dana Desa. Hal ini konsisten dengan hasil pembobotan elemen yang menjadi prioritas dalam penguatan kelembagaan desa. Elemen yang mendapatkan bobot tertinggi adalah elemen regulatif, diikuti oleh elemen normatif dan elemen kultural-kognitif.

Kata Kunci: Faktor Penghambat, Kelembagaan Desa, Pengelolaan Dana Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



SUMMARY

SHABRINA AGUSTIN GHASSANI. *Inhibiting Factors of Managing Village Fund Program: A Review from Institutional Perspective*. Supervised by DOMINICUS SAVIO PRIYARSONO, WIWIEK RINDAYATI and ANNISA UTAMI SEMINAR

Since the presence of Nawacita's third point, development in Indonesia has begun to focus on the development of rural areas. This is indicated by the presence of Law Number 6 of 2014 about Villages. The presence of Law No. 6/2014 confirms the recognition of the status and legal certainty of villages in the state system of the Republic of Indonesia. Through Law No. 6/2014, villages as the smallest locus of government in Indonesia are also given additional income in the form of Village Funds which are budgeted annually in the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The presence of the Village Fund aims to (1) Improve public services in the village; (2) Alleviating poverty; (3) Advancing the Village economy; (4) Addressing the gap between villages; and (5) Strengthening village communities as subjects of development.

Bogor Regency is the district with the largest Village Fund in West Java. However, violations of the Village Fund management are still found such as making fictitious reports, delays in reporting, to uses that are outside their priority areas. This is due to the weakness of the village's institutional capacity which has an impact on the poor implementation of the Village Fund program, resulting in sub-optimal village development. On the other hand, institutions are dimensions that have an important role in development because they play a role in regulating the management, efficiency, and sustainability of resources.

Based on this background, the objectives of this study are (1) to identify the role of village institutions in implementing the Village Fund program; (2) Analyzing institutional elements that are inhibiting factors in the Village Fund program; and (3) Formulating strategies to strengthen village institutions in implementing the Village Fund program.

This research was conducted in a case study of three villages in Bogor Regency. The composition of the three case study villages consists of one developed village, one developing village, and one underdeveloped village. The name of the village was changed to Village X, Village Y, and Village Z at the request and agreement with informants. Mixed method approach using sequential mixed method is applied with a sequential procedure that starts with qualitative data collection and data analysis and continues with quantitative data collection and data analysis. A qualitative approach is used to identify the role of village institutions and analyze the inhibiting factors of the Village Fund program based on an institutional perspective. While the quantitative approach is used to formulate a strategy for strengthening village institutions in carrying out the Village Fund program.

In the qualitative approach, content analysis and thematic analysis are used as methods to answer the first and second objectives. The results of the analysis show that the role of village institutions in the implementation of the Village Fund program based on the institution elements of cultural-cognitive, normative, and regulatory in X Village as a village with a developing village typology, is better



than Y Village with an advanced village typology and Z Village with an underdeveloped village typology. This is because the participation and social cohesion of the community in Village X are based on awareness of rights for decision making and the achievement of common goals. In addition, Village Head X is considered more transparent, innovative, and responsive in carrying out the Village Fund program so that he is able to establish synergy and gain public trust.

The results of the analysis also show that the inhibiting factors for the Village Fund program are found in each institutional element. In the cultural-cognitive and normative elements, the low level of community knowledge in the three villages resulted in the allocation of Village Fund utilization which was not oriented towards increasing human resource capacity. In addition, in Village Y and Village Z, the low level of community knowledge supported by the lack of transparency and innovation of the village head resulted in the inhibition of optimal BUMDes management. Not only that, the weak participation and social cohesion of the community in Village Y and Village Z causes the community to only act as objects of development. In the regulatory element, the weak regulation of monitoring and evaluation of the Village Fund program in Village Y and Village Z leads to the low commitment of the village government to manage Village Funds properly.

In the quantitative approach, the Analytical Hierarchy Process or AHP method is used to present the priority strategies for strengthening village institutions based on the problems that have been found. From the five alternative strategies produced, AHP shows the strategy that has the priority to strengthen village institutions is to build regulations that present social control schemes for evaluation and monitoring of Village Funds. This is consistent with the results of the weighting of elements that are a priority in strengthening village institutions. The element that gets the highest priority is the regulatory element, followed by the normative element and the cultural-cognitive element.

Keywords: *Inhibiting Factors, Village Institutions, Village Fund Management*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2022
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN PROGRAM DANA DESA: TINJAUAN PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

SHABRINA AGUSTIN GHASSANI

Tesis
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Sains pada
Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

**ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tim Penguji pada Ujian Tesis:

1. **Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si**
2. **Dr. Muhammad Findi Alexandi, SE, M.E**



Judul Tesis : Faktor Penghambat Pengelolaan Program Dana Desa:
Tinjauan Perspektif Kelembagaan
Nama : Shabrina Agustin Ghassani
NIM : H051190031

@Hak cipta milik IPB University

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Prof. Dr. Ir. Dominicus Savio Priyarsono M.S.



Pembimbing 2:
Dr. Ir. Wiwiek Rindayati M.Si



Pembimbing 3:
Dr. Annisa Utami Seminar S.IP, M.Si



Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Prof. Dr.Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc
NIP 19620421 198603 1 003



Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Prof. Dr.Ir. R Nunung Nuryartono, M.Si
NIP 19690909 199403 1 001



Tanggal Ujian: 11 November 2022

Tanggal Lulus: 21 DEC 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan Juni 2022 ini berjudul “Faktor Penghambat Pengelolaan Program Dana Desa: Tinjauan Perspektif Kelembagaan”. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Dominicus Savio Priyarsono M.S., Dr. Ir. Wiwiek Rindayati M.Si, dan Dr. Anisa Utami Seminar S.IP, M.Si selaku komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyelesaian tesis
2. Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si dan Dr. Muhammad Findi Alexandi, SE, M.E selaku dosen penguji yang telah memberi saran dan ilmu dalam perbaikan tesis
3. Kedua orangtua dan adik penulis, Bapak Budi Setiawan, Ibu Fatimah dan Assa Putri Nada atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang diberikan
4. Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc selaku Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, seluruh dosen dan pegawai atas dukungan dan pelayanan akademik yang sangat baik selama penulis menempuh perkuliahan
5. Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pendamping Lokal Desa, dan masyarakat di desa lokasi penelitian atas kesediaan waktu dan kerjasamanya dalam membantu kelancaran penelitian
6. Bapak Razali AR, M.Si selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dan Koordinator Pembangunan Dana Desa Provinsi Aceh, Bapak Suhada selaku Pelaksana Pendapatan dan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, dan Bapak Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si selaku Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor atas waktu dan kerjasamanya sebagai informan ahli dalam penelitian ini
7. Ibu Dian A Rahim, teman-teman PWD 2019 dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu penulis selama penelitian dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Desember 2022

Shabrina Agustin Ghassani

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	5
II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pembangunan Wilayah Pedesaan	7
2.2 Program Dana Desa	8
2.3 Teori Kelembagaan	13
2.3.1 Teori Kelembagaan dalam Pengelolaan Dana Desa	15
2.4 Kerangka Pemikiran	15
III METODE	19
3.1 Desain Penelitian	19
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3.3 Jenis dan Sumber Data	20
3.4 Informan dan Informan Ahli	20
3.5 Metode Analisis	21
3.5.1 Metode Analisis Isi dan Analisis Tematik	22
3.5.2 Metode Analisis Deskriptif	26
3.5.3 Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	26
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Tipologi Pada Desa Studi Kasus	31
4.2 Tahapan Pengelolaan Dana Desa	32
4.3 Peran Aktor dalam Pengelolaan Dana Desa	34
4.4 Identifikasi Peran Kelembagaan Desa dalam Pengelolaan Program Dana Desa	38
4.4.1 Elemen Kultural-Kognitif	38
4.4.2 Elemen Normatif	42
4.4.3 Elemen Regulatif	46
4.5 Analisis Faktor Penghambat Program Dana Desa Berdasarkan Perspektif Kelembagaan	50
4.5.1 Peningkatan Kemiskinan di Desa	52
4.5.2 Masyarakat Desa Sebagai Objek Pembangunan	53
4.5.3 Lemahnya BUMDes Sebagai Stimulus Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa	54
4.6 Strategi Penguatan Kelembagaan Desa dalam Mengelola Program Dana Desa	56
4.6.1 Level 1: Elemen Penting dalam Penguatan Kelembagaan Desa	56



4.6.2	Level 2: Alternatif Strategi Penguatan Kelembagaan Desa dalam Mengelola Program Dana Desa	57
-------	---	----

V	SIMPULAN DAN SARAN	63
5.1	Simpulan	63
5.2	Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN	69
	RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR TABEL

1	Jumlah Dana Desa di Kabupaten Bogor	2
2	Kebijakan terkait Desa sejak Periode Orde Lama Hingga Reformasi	8
3	Klasifikasi Belanja Desa	12
4	Tujuan Penelitian, Jenis, Kebutuhan, dan Sumber Data Pendekatan	19
5	Daftar Informan Ahli dalam Metode AHP	21
6	Sintesis Metode Analisis	21
7	Indikator Elemen Kelembagaan Desa	22
8	Ilustrasi Analisis Isi dan Analisis Tematik Tahap Satu	23
9	Ilustrasi Analisis Tematik Tahap 2	24
10	Matriks Perbandingan	28
11	Skala Kepentingan	28
12	Identifikasi Elemen Kultural Kognitif	39
13	Identifikasi Elemen Normatif	43
14	Identifikasi Elemen Regulatif	46
15	Jumlah KPM di Desa X, Y, dan Z	53
16	Alternatif Strategi dari Masing-masing Informan Ahli	58
17	Sintesis Alternatif Strategi	59
18	Hasil Pembobotan AHP pada Alternatif Strategi	60

DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka Pemikiran	17
2	Tahapan Metode Analisis Wacana	25
3	Tahapan Analisis Deskriptif	26
4	Tahapan Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i>	28
5	Bagan Alir Data, Analisis Data, Keluaran, dan Tujuan Penelitian	30
6	Gambaran Umum Tahapan Pengelolaan Dana Desa	32
7	<i>Hierarchy Chart</i> Peran Aktor dalam Pengelolaan Dana Desa	34
8	Faktor Penghambat Program Dana Desa Berdasarkan Perspektif Kelembagaan	50
9	Spektrum Diagram Peran Kelembagaan Desa Berdasarkan Tipologi Desa	51
10	Alokasi Belanja Pembangunan Bersumber dari Dana Desa Tahun 2019	52
11	Struktur Hierarki Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Dana Desa	56
12	Hasil Pembobotan AHP pada Elemen Kelembagaan	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



DAFTAR LAMPIRAN

1	Panduan Wawancara Semi Terstruktur Pemerintah Daerah	70
2	Panduan Wawancara Semi Terstruktur Pemerintah Desa	71
3	Panduan Wawancara Semi Terstruktur BPD	74
4	Panduan Wawancara Semi Terstruktur Pendamping Desa	75
5	Panduan Wawancara Semi Terstruktur Perwakilan Masyarakat	77
6	Panduan Wawancara Semi Terstruktur Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	78
7	Panduan Wawancara Semi Terstruktur Informan Ahli	79
8	Kuesioner <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	81